

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh dewan komisaris wanita, komite audit, dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*. Berikut kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan sebagai berikut:

- a. Pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis pertama (H_1) ditolak.
- b. Pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka menolak hipotesis kedua (H_2).
- c. Pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka menolak hipotesis ketiga (H_3).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan, peneliti mengajukan saran kepada berbagai pihak, agar penelitian ini dapat dikembangkan, yaitu :

1. Saran Teoritis

Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel seperti kehadiran rapat dewan komisaris (Marsahala et al., 2020), manajemen laba (Darma et al., 2019), kepemilikan terkonsentrasi (Alang & Syahdan, 2020), dll. Selain itu penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sektor non manufaktur dan menambahkan kurun waktu pengamatan, karena terdapat perubahan tarif Pph badan.

2. Saran Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Disarankan untuk manajemen perusahaan untuk membenahi

mekanisme *corporate governance* seperti struktur dewan komisaris dalam perusahaan yakni lebih memperhatikan kesetaraan gender dalam bekerja sehingga membuka peluang bagi wanita yang berpotensi melakukan pengawasan lebih intensif untuk menjabat dalam struktur dewan komisaris sehingga dapat mengecilkan tindakan *tax avoidance*, lalu untuk komite audit perlu mengasah kembali keahlian akuntansi yang dimiliki agar dapat melaksanakan mandatnya secara berkala dalam pengawasan pelaporan keuangan agar dapat mendeteksi manajemen yang berupaya melakukan praktik *tax avoidance*, serta secara efektif melakukan pengawasan pengendalian internal perusahaan.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah disarankan memperbaiki administrasi perpajakan serta mengawasi perilaku wajib pajak agar terhindar dari celah yang mengakibatkan penghindaran pajak. Lalu lebih memperhatikan kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan *tax avoidance*, khususnya faktor terkait dengan *corporate governance* supaya pemerintah dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola pajak negara.